

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan (Mediaty dan Syarifudin, 2010). Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005). Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi

pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Mediaty dan Syarifudin, 2010).

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula dalam kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi, dan utilitas publik (Tatom, 1993).

Menurut peraturan gubernur Sumatera Barat no 19 tahun 2018 perjalanan dinas secara umum adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan adalah tugas pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga perusahaan yang bersangkutan. Perjalanan dinas pimpinan biasanya dilakukan karena berbagai kepentingan, antara lain pelaksanaan dan pengawasan di

kantor cabang atau perusahaan cabang, seminar, diklat, tender, janji temu, peninjauan kerja sama, menghadiri acara seremonial, kegiatan sosial, dan lain-lain. Sehubungan dengan perjalanan dinas, maka seorang pemimpin tidak perlu mempersiapkan segalanya karena telah ada seorang sekretaris yang akan mempersiapkan perjalanan dinas mulai dari keberangkatan sampai kepulangannya dari perjalanan dinas.

Maka dengan demikian mekanisme pengelolaan penganggaran perjalanan dinas sangat penting diperhatikan untuk kesuksesan perjalanan dinas. Agar dana yang digunakan sesuai dengan target yang telah dianggarkan. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana “ **mekanisme pengelolaan penganggaran perjalanan dinas pada dinas Pekerjaan Umum dan Pempatan Ruang Provinsi Sumatera Barat**” sebagai judul dalam tugas akhir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang dibahas dalam tugas akhir adalah : Bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada dinas Pekerjaan Umum dan Pempatan Ruang Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan dan manfaat Magang

1.3.1 Tujuan Magang

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan magang adalah :
untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran perjalanan

dinas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Manfaat Magang

1. Meningkatkan proses pembelajaran melalui proses pendidikan berbasis praktik sehingga nantinya lulusan akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional pada kondisi kerja yang sesungguhnya.
2. Membangun link and match sehingga terbentuknya keterkaitan dan kesepakatan antara diperguruan tinggi dan didunia kerja.
3. Terjalannya hubungan yang baik antara Universitas dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatra Barat.

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Magang dilakukan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sumatera barat, dengan waktu pelaksanaan selama 40 hari kerja yang dimulai pada awal Januari sampai akhir Februari 2020.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Secara garis besar penulisan laporan ini disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menerangkan tentang bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran prasarana jalan pada pekerjaan umum.

BAB III Gambaran Umum instansi

Dalam bab ini membahas gambaran umum dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan anggaran.

BAB IV Pembahasan

Bab ini membicarakan mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan Jalan dinas prasarana jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dan pelaksanaan magang yang dilakukan penulis.

